

DAFTAR PUSTAKA

Dalam penelitian ini agar penulis memiliki pengetahuan yang relevan yang berhubungan dengan BUMN, perseroan terbatas dan keuangan negara, maka diperlukan bahan teoritis dan konsepsional. Bahan-bahan tersebut antara lain:

A. Buku

Ali, Chidir, 2011, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung

Atmadja, Arifin P Soeria., 2013, *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Edisi ketiga, PT Raja Grafindopersada, Jakarta.

Atmadja, Arifin P Soeria, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT Gramedia, Jakarta.

Atmadja, Arifin P. Soeria, 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung.

Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, PT Tatanusa, Jakarta.

Diah, Marwah M., 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia, Privatisasi atau Korporatisasi*, Literata, Jakarta.

Halim, A Ridwan, 1985, *Hukum Perdata dan Tanya Jawab (cet.2)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Halim, Abdul & Icuk Ranga Bawono, 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Hardijan, Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum (cet.8)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2007, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, CV. Andi Offset,
Yogyakarta.

Prasetya, Rudhi, 2013, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Simatupang, Dian Puji N., 2011, *Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan
Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, (Disertasi Program
Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Depok.

Sulaiman Alfin, 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif
Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sumaryanto, A. Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam
Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1991, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan
Penelitian Hukum Empiris*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
“Masalah- Masalah Hukum”, Nomor 9, Semarang.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.

Suhartono, Irawan, 1995, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wijaya, Gunawan, 2008, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat,
Jakarta.

B. Putusan Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, tentang pengujian terhadap Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 417 K/Pid.Sus2014 tanggal 7 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1144 K/Pid/2006,
tanggal 13 September 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 43/Pid.Sus. K/2014/PN.Mdn,
tanggal 1 Oktober 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 45/Pid.Sus. K/2014/PN.Mdn,
tanggal 3 Oktober 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pid.Sus. K/2014/PN.Mdn,
tanggal 1 Oktober 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 12 Februari 2013.

C. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). diterjemahkan oleh R. Subekti
dan R. Tjitrosudibio (cet.28 (ed. revisi)). (1996). Jakarta: Pradnya Paramita, Ps.1653.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106
Tahun 2007, TLN No.4756, Ps.7 ayat (4).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN
Nomor 70 Tahun 2003, TLN No.4297, Ps. 4 ayat (2) beserta penjelasannya.



Republik Indonesia. *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No.17 Tahun 2003, LN

Nomor 47 Tahun 2007, TLN No. 4286, Ps.3 ayat (1).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 Tahun 2004, LN

No.5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Ps. 1 ayat (22).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi*

Pemerintah, PP No.8 Tahun 2006, LN No.25 Tahun 2006, Ps.5 ayat (1).

D. Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006

E. Internet

Atja Sondaja, *Beberapa Permasalahan Hukum*. Diakses dari website Mahkamah Agung RI

(https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15d.beberapa_permasalahan_hukum.pdf), diakses tanggal 2 Februari 2016.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2013). *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan: Apakah Tidak Termasuk*

Keuangan Negara,

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386563323.pdf, diakses

tanggal 22 Juni 2015.

Erman Rajaguguk (1), *Peranan Hukum Dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan*

Negara dan Kesejahteraan Rakyat, www.ermanhukum.com, diakses tanggal 28 Juli

2008.

Rumusan Hasil Diskusi Komisi I Bidang Perdata dan Perdata Khusus, Diunduh dari website

Mahkamah Agung RI:

https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/11a.RUMUSAN_KOMISI2.pdf,

diakses tanggal 2 Februari 2016.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Laporan

**KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI NEGARA
SEBAGAI PEMEGANG SAHAM**

HAMONANGAN BUDDHIWISNU HARAHAP, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Keuangan

Pemerintah

Pusat

Tahun

2013

(Audited),

<http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2013-audited>

diakses tanggal 10 Desember 2015.